



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DODDY HARRY DWINARJAWAN
2. Jabatan : PENGELOLA PENGADAAN UKPBJ
3. NHK : 781768

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.235.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/70 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 738 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1.173 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
4. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
5. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
6. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
7. Tanah Seluas 1.200 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/17 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
9. Tanah Seluas 750 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , Rp. 75.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 29 m2/29 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 91.000.000

1. MOTOR, SUZUKI SHOGUN 125 Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000
2. MOBIL, TOYOTA HILUX RN25 Tahun 1978, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000
3. MOBIL, CHEVROLET SPIN Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. 4.752.529.800

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 3.050.762

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 8.081.580.562

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 8.081.580.562

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.